

BAB III

Peran Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kabupaten Natuna Tahun 2015

A. Peran Dinas Pariwisata

1. Peran Sebagai Koordinator

a. Pengelolaan Kegiatan Pariwisata

Salah satu peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan potensi obyek wisata adalah koordinator. Koordinator yang dimaksud adalah mengatur dan mengkonsepsikan dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara mengembangkan potensi obyek wisata dengan cara mempromosikan pariwisata dan pemasaran pariwisata.

1) Wisata Alam

Peran pemerintah dalam sebagai koordinator dalam mengelola kegiatan wisata alam di Kabupaten Natuna. Meliputi penyusunan program kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Pemerintah Kabupaten Natuna telah mengelola kegiatan dalam bidang wisata alam salah satunya melalui kegiatan lomba perahu dayung yang di adakan di Pantai Setai, yang seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah.

“ Di Kabupaten Natuna belum banyak kegiatan wisata alam dikarenakan akses yang sangat terbatas, namun kami telah membuat lomba perahu dayung untuk untuk masyarakat yang di adakan setiap setahun sekali, setiap kegiatan yang dilaksanakan melalui perencanaan, dan evaluasi”

Berdasarkan pernyataan tersebut peran pemerintah dalam pengelolaan kegiatan wisata alam sudah cukup baik namun perlu peningkatan, dimana belum banyak kegiatan² yang dilakukan di objek wisata alam.

2) Wisata Kuliner

Peran pemerintah dalam mengelola kegiatan pariwisata kuliner di Kabupaten Natuna sejauh ini sudah cukup baik dimana pemerintah memberikan himbaun kepada masyarakat terutama yang tinggal di sekitar objek wisata untuk menjual makan khas dari Kabupaten Natuna. Kegiatan wisata kuliner yang dikelola oleh Pemerintah melalui adanya pasar jajan. Pasar Jajan yang diselenggarakan setiap sore hari di Kota Natuna dimana Pemerintah menyediakan lahan untuk berjualan dengan pajak yang murah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa”

“Kami telah membuat central kuliner yang bernama Pasar Jajan dipasar itu terjual makana-makanan khas Kabupaten Natuna seperti Karnas dan Lampar yang terkenal juga masakan nusantara yang dilakukan setiap sore hari buka pukul 15.00 WIB sampai 21.00 WIB, kami juga menerapkan pajak yang murah bagi para pedagang”

Kegiatan wisata kuliner yang diadakan oleh Pemerintah untuk menarik wisatawan cukup baik namun masih harus dikembangkan seperti diadakanya festival makanan guna menarik perhatian wisatawan.

3) Wisata Budaya

Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna berupaya untuk mengadakan strategi promosi dan pemasaran pariwisata yang ada di Kabupaten

Natuna. Hal ini terbukti dengan mengikuti berbagai macam *event* atau pameran-pameran untuk mempromosi maupun pemasaran pariwisata. Selain itu menyebarkan brosur diberbagai hotel dan restaurant agar banyak yang mengenal pariwisata di Kabupaten Natuna. Hal tersebut dilakukan agar banyak orang yang tahu tentang potensi obyek wisata di Kabupaten Natuna dan dapat meningkatkan kunjungan wisata dalam membantu pengembangan daerah Kabupaten Natuna

Menurut pengakuan warga setempat menunjukan bahwa sejauh ini Dinas Pariwisata telah melakukan upaya promosi dan pemasaran pariwisata dengan mengikuti *event* dalam daerah maupun luar daerah. Dan diadakannya pemilihan duta wisata sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan dan mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Natuna. Selain itu dinas Pariwisata di Kabupaten Natuna juga telah memiliki website resmi sehingga bisa menyebarluaskan informasi mengenai keindahan dan daya tarik Kabupaten Natuna.

Seperti wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

“Dinas Pariwisata selama ini berperan sebagai koordinator adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait kepariwisataan seperti adanya event dan pameran-pameran”

Sedangkan hasil wawancara dengan Kabid Seni Pertunjukan dan Dokumentasi Kepariwisataan menyatakan sebagai berikut :

“Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna telah memberikan wadah atau ajang untuk pengembangan potensi wisata melalui berbagai kegiatan baik yang di adakan secara rutin setiap bulan maupun setiap tahun, kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi Pariwisata di Kabupaten Natuna”

Hasil wawancara tersebut didukung dengan pernyataan yang dikemukakan oleh pengunjung yang berada di Pantai Satai hasil wawancara pengunjung menyatakan :

“Bahwa setiap bulan di alun-alun Kota Natuna terdapat pentas seni seperti kesenian Alu dan Mendu Natuna dan setiap tahun ada Pasar malam”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga responden di atas peran Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna sebagai koordinator telah baik dimana Pemerintah telah mengadakan berbagai kegiatan untuk menunjang pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Natuna.

Selain itu peran serta masyarakat terhadap pengembangan obyek wisata di Kabupaten Natuna juga diperlukan dengan cara menyebarluaskan informasi mengenai daerah mereka. Pariwisata tidak akan berkembang jika wisatawan tidak tahu atau tidak berminat untuk berkunjung ke obyek wisata tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya promosi baik melalui media elektronik maupun dari mulut ke mulut yang bertujuan menarik atau memperkenalkan wisata kepada masyarakat luas.

b. Melaksanakan Koordinasi dengan Berbagai Instansi

1) Wisata Alam

Peran pemerintah dalam melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi di bidang wisata alam meliputi pemerintah mengadakan kerjasama dengan investor untuk meningkatkan sarana dan prasana seperti hotel, penginapan dan restoran selain itu pemerintah juga berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti dinas kehutanan, dinas

perikanan dan kelautan untuk turut serta membangun potensi wisata di Kabupaten Natuna. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh dinas pariwisata Kabupaten Natuna yang menyatakan bahwa :

“Kami melakukan kerja sama dengan investor seperti pemilik hotel dan restoran kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti dinas Perikanan dan Kelautan untuk ikut serta membangun potensi wisata di Kabupaten Natuna”

Sementara wawancara dengan pemilik hotel menyatakan bahwa :

“Kami bekerja sama dengan pemerintah dimana pemerintah memberikan kemudahan kepada kami untuk mendirikan hotel dan restoran yang berada di kawasan objek wisata”

Berdasarkan hasil tersebut koordinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam bidang wisata alam terhadap instansi terkait sudah cukup baik.

2) Wisata Kuliner

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang wisata kuliner selama ini yang dilakukan pemerintah hanya menghimbau kepada masyarakat terutama yang tinggal di lokasi objek wisata untuk menjual makanan khas Kabupaten Natuna. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pedagang yang ada di objek wisata menyatakan bahwa:

“Kami berjualan atas himbauan pemerintah dengan lapak yang disediakan secara gratis namun kami tidak mendapatkan pinjaman modal usaha”

Sementara Kepala Dinas Pariwisata menyatakan bahwa:

“Warga yang tinggal di kawasan objek wisata saya himbau untuk menjual ole-oleh khas dari Kabupaten Natuna untuk menciptakan identitas Kabupaten Natuna namun Kami belum bisa memberikan pinjaman modal hal tersebut dikarenakan kendala anggaran yang masih kurang”

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan koordinasi yang dilakukan Pemerintah dengan berbagai instansi dalam bidang wisata kuliner masih sangat terbatas dimana pemerintah belum bisa memberikan dukungan seperti pinjaman modal usaha untuk para masyarakat.

3) Wisata Budaya

Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam dalam berkoordinasi dengan instansi terkait wisata budaya meliputi : Kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan Dinas Kebudayaan, dengan para tokoh-tokoh adat, perangkat desa dan masyarakat. Dimana Pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Kabid Seni Pertunjukan menyatakan bahwa :

“Kami melakukan kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, pemangku adat, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk menyelenggarakan acara baik yang dilaksanakan secara bulanan maupun tahunan untuk menunjang pengembangan potensi wisata di Kabupaten Natuna”

2. Peran Sebagai Fasilitator

Peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator adalah menyediakan fasilitas di berbagai obyek wisata seperti sarana dan prasarana wisata. Sarana dan prasaran memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan obyek

wisata dan dapat menarik para pengunjung untuk mengunjungi obyek wisata tersebut.

a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata

1) Wisata Alam

Kabupaten Natuna ini sendiri dalam penyediaan sarana dan prasarana telah didukung dengan adanya berbagai hotel, restaurant atau rumah makan, toko souvenir atau pusat oleh-oleh, serta jaringan transportasi dan komunikasi, listrik dan air sudah tersedia hingga desa-desa di Kabupaten Natuna.

Hasil tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna yang menyatakan

“Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna telah menyediakan sarana dan prasarana pariwisata seperti menyediakan hotel, restoran, toilet umum, dan tersedianya pusat oleh-oleh di lokasi pariwisata, namun hal tersebut belum tersebar secara merata di seluruh obyek wisata yang ada di Kabupaten Natuna”

Sedangkan hasil wawancara dengan Kabid Destinasi Pariwisata menyatakan bahwa :

“Bahwa Pemerintah telah menyediakan bebrbagai fasilitas seperti toilet umum hotel dan restoran yang menungjang potensi pariwisata dan selama ini pemerintah telah mengupayakan meningkatkan saran dan prasarana lebih baik lagi”

Kemudian peneliti mengali lebih dalam lagi dengan pengunjung yang sedang berwisata menyatakan bahwa

“Sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah masih belum merata diseluruh obyek wisata di pantai-pantai tertentu belum tersedia toilet umum dan tempat-tempat makan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan maka dapat disimpulkan bahwa peran dinas pariwisata sebagai fasilitator masih kurang dimana sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah masih belum merata. Dimana terdapat beberapa tempat wisata yang belum tersentuh oleh Dinas Pariwisata masih minimnya sarana dan prasana serta akses transportasi yang belum memadai. Tetapi dengan hal tersebut Dinas Pariwisata masih terus berupaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang ada pada obyek wisata di Kabupaten Natuna, melalui pembangunan jalan menuju lokasi wisata.

Berdasarkan pengamatan penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini Dinas Pariwisata telah melakukan upaya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendukung wisata. Hal tersebut dilihat dengan beberapa dari obyek wisata yang ada di Kabupaten Natuna telah dilakukan perbaikan jalan menuju lokasi dan di obyek wisata tersebut telah dibuat gazebo, tempat istirahat, dan kamar mandi, musola di patai-pantai dekat kota seperti pantai setai, batu catur, air terjun batu hiu. Sedangkan di obyek wisata lainnya masih diupayakan.

2) Wisata Kuliner

Peran Pemerintah dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang wisata kuliner meliputi disediakanya tempat berjualan seperti yang terdapat di taman jajan, adanya pusat oleh-oleh, serta tersedianya ruko atau tempat berjualan gratis di sekitar objek wisata.

Keadaan tersebut seperti yang diungkapkan oleh warga yang berjualan di sekitar objek wisata yang menyatakan bahwa:

“Tempat yang kami gunakan diberikan secara gratis oleh Pemerintah, sebelumnya kami dihimbau untuk berjualan khas dari Kabupaten Natuna”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Dinas pariwisata Kabupaten Natuna yang menyatakan bahwa :

“Kami memberikat tempat-tempat berjualan secara gratis untuk masyarakat agar digunakan untuk berjualan oleh-oleh khas dari Natuna namun tidak semua gratis hanya objek-objek wisata yang masih sepi dan tanpa membayar pajak”

Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa peran pemerintah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana wisata kuliner adalah dengan menyediakan tempat berjualan oleh-oleh.

3) Wisata Budaya

Peran Dinas Pariwisata dalam meningkatkan sarana dan prasarana wisata budaya adalah dengan memberikan sumbangan untuk pemberian alat-alat musik tradisional, baju-baju adat dan dengan didirikan sangar seni untuk berlatih tentang kesenian. Hal tersebut diakui oleh Pemangku adat yang menyatakan bahwa :

“Kami diberi kepercayaan oleh Pemerintah untuk melestarikan budaya daerah dan diberikan peralatan untuk mendukung kegiatan kebudayaan seperti pementasan tari mendu dan yang lainnya”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah memberikan peralatan seni seperti alat musik, baju adat dan sangar yang dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk mendukung kegiatan kepariwisataan”

Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengadaan sarana dan prasarana wisata budaya adalah dengan memberikan perlengkapan penunjang kegiatan kesenian dan kebudayaan.

b. Menciptakan Strategi Promosi Wisata

1) Wisata Alam

Strategi promosi yang diciptakan untuk pemerintah untuk mempromosikan potensi wisata alam yang dimiliki Kabupaten Natuna adalah melalui media internet yaitu adanya website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna yang berisi tentang berbagai objek wisata alam yang mulai pantai, gunung dan air terjun. Seperti yang diakui oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna yang menyatakan bahwa:

“Kami memiliki Website resmi yang memuat tentang objek wisata alam yang dimiliki Kabupaten Natuna lengkap beserta petunjuk perjalanannya sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Natuna”

Promosi yang dilakukan Pemerintah hanya sekedar melalui Website belum melalui strategi promosi lain sehingga pemerintah masih perlu meningkatkan strategi promosi lain untuk potensi wisata alam.

2) Wisata Kuliner

Strategi promosi yang diciptakan untuk pemerintah untuk mempromosikan potensi wisata kuliner yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Natuna yaitu melalui adanya pasar jajan dan melalui website yang memberikan informasi mengenai makanan khas Kabupaten Natuna.

“Dalam website kami juga memuat tentang potensi wisata kuliner yang dimiliki Kabupaten Natuna secara terperinci sehingga dapat menarik wisatawan untuk mencoba makanan tersebut”

Berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Pariwisata maka strategi promosi untuk memasarkan wisata kuliner adalah dengan menyediakan tempat berjualan makanan khas dan adanya website yang memuat tentang wisata kuliner kedua strategi tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik sehingga mengundang wisatawan berkunjung Ke Natuna.

3) Wisata Budaya

Promosi wisata budaya yang diciptakan Pemerintah untuk menarik wisatawan adalah melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti adanya festival budaya dan pameran budaya yang diadakan setiap tahun, serta menggunakan website yang memuat tentang kesenian dan budaya yang terdapat di Kabupaten Natuna. Hal tersebut dibenarkan oleh pengunjung di alun-alun Kota Natuna yang menyatakan bahwa:

“Setiap tahun pemerintah mengadakan festival kebudayaan seperti adanya tari-tarian tradisional, lomba mendu dan karnaval”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa :

“Selain menggunakan website kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti festival dan pameran-pameran guna untuk menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Natuna”

3. Peran Sebagai Stimulator

Peran Dinas Pariwisata sebagai stimulator adalah pemerintah dapat menstimulasi segenap pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pengembangan sektor wisata ini. menciptakan strategi untuk membangun dan mengembangkan obyek dan daya tarik wisata. Dinas Pariwisata terus melakukan pembenahan-pembenahan untuk mengembangkan potensi-potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Natuna.

a. Memberikan Pelatihan untuk Masyarakat

Peran Pemerintah dalam menstimulasi masyarakat melalui pemberian pelatihan kepariwisataan belum berjalan selama ini hanya sebatas himbauan baik pelatihan keamanan dan keselamatan wisatawan maupu pelatihan keterampilan. Hanya sebatas program dan belum terealisasi baik untuk wisata alam, wisata, kuliner dan budaya. Hal tersebut sebui yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah belum menjalankan program pelatihan untuk masyarakat hal tersebut dikarenakan kendala SDM yang belum memadai selama ini Stimulasi yang diberikan pemerintah hanya menyediakan sarana dan prasarana pariwisata”

Senada dengan Dinas Pariwisata Kabid Destinasi Pariwisata juga membenarkan pernyataan tersebut

“Pemerintah telah mengupayakan semaksimal mungkin agar masyarakat terstimulasi untuk ikut serta membangun potensi wisata hal tersebut di realisasikan dengan adanya pasar oleh-oleh yang dimana pemerintah menyediakan tempat berbayar untuk masyarakat berjualan”

Usaha pemerintah untuk menggiatkan pembangunan-pembangunan pendukung di obyek wisata, misalnya di Pantai Batu Catur pemerintah bekerja sama dengan masyarakat atau swasta. Pemerintah menyediakan tempat kantin lalu masyarakat menyewa untuk berjualan agar pengunjung tidak kesusahan untuk mencari makan atau air minum. Lalu masyarakat menyediakan jasa wahana air untuk wisatawan bermain di pantai seperti setai untuk berkeliling-keliling pantai.

b. Memberikan Kemudahan Bagi Investor

Peran Dinas Pariwisata sebagai stimulator dengan memberikan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi di Kawasan pariwisata di Kabupaten Natuna. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Kabupaten Natuna yang menyatakan bahwa :

“Kami memberikan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Natuna seperti kemudahan mengeluarkan ijin IMB dan memberlakukan pajak yang murah”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh pemilik hotel dan restoran yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah sangat memberikan kemudahan dengan memberlakukan pajak yang murah sehingga kami mau berinvestasi di kawasan wisata di Kabupaten Natuna”

Berdasarkan pengamatan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna masih terus berupaya untuk melakukan pengembangan obyek dan daya tarik wisata karena pada dasarnya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna cukup banyak dan memiliki keunikan yang cukup

menguntungkan apabila dikembangkan. Namun pada saat ini belum terealisasi karena minimnya anggaran yang dimiliki Pariwisata dalam melakukan pengembangan obyek dan daya tarik wisata di daerah Kabupaten Natuna. Untuk saat ini kemudahan yang diberikan untuk investor hanya pada wisata alam dikarenakan wisata kuliner dan budaya belum ada investor yang bekerja sama.

B. Tatakelola Pariwisata di Kabupaten Natuna

1. Partisipasi Masyarakat Terkait

Era otonomi daerah sebagai implikasi dari berlakunya UU No. 32 tahun 2004, memberikan peluang bagi setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri, serta tuntutan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Masyarakat sebagai komponen utama dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata daerah yang ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi masyarakat. UU No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Peran serta masyarakat dalam memelihara

sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata.

Menurut Nurmawati (2006), pengembangan wisata alam dan wisata budaya dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan interkoneksi dalam tatanan masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh tatanan itu sendiri guna meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal, serta obyek wisata alam dan wisata budaya yang ada. Selama ini pengembangan pariwisata daerah ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, saat ini perencanaan pengembangan pariwisata menggunakan *community approach* atau *community based development*.

a. Bentuk Partisipasi

Bentuk Partisipasi masyarakat dalam mendukung tatakelola pariwisata meliputi keikutsertaan masyarakat lokal yang akan membangun, memiliki dan mengelola langsung fasilitas wisata serta pelayanannya, sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima secara langsung keuntungan ekonomi dan mengurangi urbanisasi.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata menyatakan bahwa :

“ Selama ini kami hanya berjualan jika hari libur saja atau sabtu dan minggu karena kami menganggap bahwa keuntungan yang kami dapatkan dari mengandalkan wisata tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa usaha-usaha pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna yang berorientasi pada masyarakat lokal masih minim. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Sehingga perlunya partisipasi aktif masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik, menyediakan sesuatu yang terbaik sesuai kemampuan, ikut menjaga keamanan, ketentraman, keindahan dan kebersihan lingkungan, memberikan kenangan dan kesan yang baik bagi wisatawan dalam rangka mendukung program sapta pesona, serta menanamkan kesadaran masyarakat dalam rangka pengembangan desa wisata.

b. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata adalah dengan ikut serta vestival namun belum merata. Demikian pula di Kabupaten Natuna partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya masih sangat minim hal tersebut terlihat hanya sedikit warga yang mendukung kegiatan kepariwisataan seperti berjualan makanan khas, kain khas serta menjaga lingkungan dan ketertiban lokasi pariwisata. Mayoritas warga masih belum sadar pentingnya pariwisata untuk menunjang perekonomian.

2. Keterlibatan setiap pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan dalam industri pariwisata adalah pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai kepentingan dalam industri tersebut.

a. Pemangku Kepentingan

Pihak yang memiliki peranan dalam membangun dan menjalankan roda industri pariwisata seperti pemerintah baik pusat maupun daerah, pengusaha pariwisata seperti pemilik hotel dan resort.

b. Bentuk keterlibatan

Keterlibatan pengusaha hotel dan resort belum berjalan optimal hanya tempat wisata yang dekat dengan kota saja yang sudah menyediakan hotel dan resort begitu juga keterlibatan masyarakat masih begitu minim terlihat sebagian besar masyarakat masih belum menyadari potensi wisata yang ada di daerahnya.

Pernyataan tersebut didukung oleh pemilik Hotel yang berada di kawasan obyek wisata yang menyatakan bahwa :

“Kami masih belum berani mendirikan atau berinvestasi hotel pada kawasan wisata yang masih sepi karena ditakutkan akan merugi ditambah obyek wisata yang masih sepi akses jalan menuju kesana juga susah”

Sementara hasil wawancara mendalam dengan pemilik restoran menyatakan bahwa :

“Rumah makan kami hanya ramai di waktu libur saja di hari-hari biasa sepi bahkan makanan yang kami sediakan tidak habis, padahal saya membuka rumah makan di obyek wisata yang sudah ramai pengunjung, makadari itu kami belum berani jika harus membuka tempat makan di obyek wisata yang masih sepi”.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan belum berjalan secara optimal dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana

3. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Upaya peningkatan mutu penyelenggaraan industri akan terus didorong dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara optimal terutama masyarakat dunia usaha melalui peran sertanya dalam melakukan investasi untuk mencapai sinergi yang optimal. Partisipasi dunia usaha diharapkan akan memberikan penyertaan modal, teknologi, manajemen dan pemasaran untuk dipadukan dengan aset lahan, tenaga kerja serta fasilitas dan sarana umum. Dalam hal ini diharapkan dunia usaha, melakukan kerjasama usaha sehingga akan terwujud pertumbuhan ekonomi wilayah yang mandiri dan handal. Sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan melalui kerjasama kemitraan.

a. Bentuk Kemitraan

Kemitraan kepemilikan lokal yang terjadi di Kabupaten Natuna adalah adanya pasar oleh-oleh yang disediakan oleh pemerintah dengan sewa lahan usaha untuk berjualan. Namun penyediaan tersebut masih sangat terbatas dimana hanya tempat-tempat wisata tertentu yang sudah memiliki tempat berbelanja oleh-oleh.

Keadaan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan penjual oleh-oleh di obyek wisata di air terjun Gunung Hiu

“ Kami berjualan di sini atas himbauan Pemerintah yang menyediakan ruko sewa, pemerintah juga menghimbau bahwa yang dijual usahakan ciri khas dari Kabupaten Natuna untuk itu saya menjual Kernas ”

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan peran pemerintah dalam tatakelola pariwisata yang baik sebagai kemitraan kepemilikan lokal sudah berjalan dengan baik.

4. Pemanfaatan sumber daya secara berlanjut

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

a. Bentuk Pemanfaatan sumber daya alam

Pemanfaatan sumber daya di Kabupaten Natuna cukup baik dimana pemerintah memanfaatkan sumberdaya alam yang tidak berlebihan pembangunan sektor wisata yang ada di Kabupaten Natuna di anggap tidak merusak lingkungan seperti pantai batu catur pemerintah membiarkan pantai tersebut tetap seperti aslinya dan tidak merubah bentuk hanya menbah saranan dan parasana pariwisata sehingga tidak merusak keindahan alam yang tercipta.

Hasil wawancara dengan Perangkat Desa di kawasan obyek wisata Pantai Batu Catur menyatakan bahwa:

“Sejauh ini pemerintah tidak merubah bentuk apapun yang disediakan oleh alam, pantai Batu Catur tetap dibiarkan secara alami sebagaimana mestinya pemerintah hanya menambahkan berbagai fasilitas wisata tanpa merusak alam”

Keadaan tersebut diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna yang menyatakan bahwa:

“Kami justru akan mengandalkan keindahan alam Kabupaten Natuna sehingga kami tidak merubah bentuk alam yang sudah disediakan oleh Tuhan, kealamian inilah yang nantinya menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Natuna”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pariwisata dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak berlebihan digunakan sesuai sebagaimana mestinya tanpa merusak keadaan alam. Wisata alam yang dimanfaatkan antara lain wisata pantai dan air terjun.

5. Merekomendasikan aspirasi masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

Hasil wawancara peneliti dengan Pemangku adat di Kabupaten Natuna menyatakan bahwa:

“Saya telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan kesenian-kesenian khas dari Natuna karena ditakutkan jika budaya tersebut tidak dikenalkan dan dilestarikan maka generasi muda Natuna banyak yang tidak mengerti budayanya sendiri”

Pernyataan Pemangku adat tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa

“Kami menampung aspirasi masyarakat yang sifatnya positif dan memiliki peranan dalam pengembangan obyek wisata di Kabupaten Natuna”

Pemerintah Kabupaten Natuna telah merekomendasikan aspirasi masyarakat guna mendukung pengembangan pariwisata salah satu aspirasi masyarakat yang terwujud adalah adanya adanya gelar budaya seperti Mendu Natuna yang diadakan oleh masyarakat di sekitar pantai Satai.

6. Daya dukung lingkungan

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan

lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

Bersarkan hasil wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna yang menyatakan bahwa:

“Kami membangun sektor wisata telah mempertimbangkan aspek lingkungan seperti keadaan obyek wisata aman dari kekerasan, aman kadam keadaan geografis dan aman bagi keselamatan anak-anak”

Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna telah menerapkan pembangunan sektor pariwisata sesuai dengan kapasitas yang dimiliki seperti konsidi lingkungan di Kabupaten Natuna cukup aman untuk di datangi,serta ditambah dengan budaya lokal yang menarik.

7. Monitor dan evaluasi Program

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mencakup skala nasional, regional, dan lokal.

Hasil wanacanra menadalam dengan Kepala Dinas Pariwisata menyatakan bahwa

“Setiap unit kegiatan apapun yang telah kami lakuakn selalu dilakukan evaluasi hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak kelebihan dan kekurangan dari suatu program”

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Kepala Dinas Pariwisata mengaku telah mengevaluasi semua program dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah. Jika program berjalan baik sesuai rencana maka pemerintah mempertahankan dan meningkatkan program tersebut namun jika hasil evaluasi di sana program tidak berjalan sesuai rencana maka pemerintah memperbaiki program tersebut.

8. Pelatihan kepada masyarakat terkait

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, *vocational*, dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan.

Hasil wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Pariwisata menyatakan bahwa:

“Kami belum bisa mengadakan pelatihan untuk masyarakat hal tersebut dikarenakan berbagai hambatan diantaranya ketersediaan SDM yang memadai”

Hasil tersebut dibenarkan oleh Kabid Destinasi Pariwisata yang menyatakan bahwa:

“ Program pelatihan masyarakat sebenarnya sudah lama kami canangkan namun dikarenakan berbagai keterbatasan sehingga rencana itu belum sempat terlaksana ”

sedangkan hasil wawancara dengan masyarakat yang tinggal di kawasan obyek wisata mengaku :

“Belum pernah ada pelatihan apapun yang diadakan oleh pemerintah terkait pengembangan potensei pariwisata”

Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna belum menerapkan program pelatihan bagi masyarakat terkait, pelatihan kepariwisataan hanya pernah diberikan kepada pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna saja dalam bentuk seminar, work shop.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kabupaten Natuna

1. Faktor Pendukung

a. Potensi Alam

Kabupaten Natuna memiliki potensi wisata alam yang tidak kalah menarik dengan daerah lainya di Indonesia. Kekuatan wisata alam di Kabupaten Natuana adalah kondisi pantai yang masih asri dan alami, gunung dan wisata alam legenda yang menarik. Potensi wisata alam meliputi pantai, air terjun dan gunung.

b. Potensi Kebudayaan

Kebudayaan disini adalah kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya meliputi kebudayaan tinggi seperti kesenian atau perkehidupan keraton dan sebagainya, akan tetapi juga adat istiadat dan segala kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Modal kebudayaan itu penting untuk menarik wisata agar dapat berkunjung dan menikmati kebudayaan tersebut. Kabupaten Natuna dengan ciri khas masyarakat melayu dengan

berbagai tradisi, adat serta tarian² yang dimiliki menjadi daya tarik tersendiri di Kabupaten Natuna.

c. Potensi Manusia

Kabupaten Natuna memiliki banyak obyek wisata, event budaya dan daerah yang relatif aman dan mudah untuk dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Serta partisipasi masyarakat yang baik terhadap kegiatan yang ada di Kabupaten Natuna.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan program tidak terlepas dari kendala-kendala yang akan dihadapi mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan. Demikian juga dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam menjalankan perannya dalam mengembangkan potensi obyek wisata di Natuna selalu ada faktor penghambat yang terjadi

a. Dana yang terbatas

Faktor yang mempengaruhi tidak dan lacarnya pembangunan pariwisata di Kabupaten Natuna adalah keterbatasan dana. Sektor pariwisata merupakan sektor pilihan bukan sektor yang wajib didahulukan oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah Kabupaten Natuna juga mengupayakan secara maksimal dalam anggaran di bidang pariwisata karena pariwisata daerah merupakan aset yang dimiliki dan bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna sendiri.

b. Lokasi geografis obyek wisata

Bagi obyek wisata seperti pegunungan sangat susah dijangkau. Jika ingin menambah fasilitas sarana dan prasarana yang lain. Dengan kondisi tersebut maka ditakutkan akan mahal biaya angkut, dan lain-lain menuju obyek wisata tersebut.

c. Status kepemilikan lahan dengan pihak lain

Status kepemilikan hutan yang ada di Kabupaten Natuna masih sebagian besar dimiliki oleh Dinas Kehutanan. Jadi tidak bisa sembarangan membangun dan memperluas obyek wisata. Selain itu juga untuk lokasi wisata yang didaerah pesisir banyak dikuasai oleh masyarakat. Sehingga sangat sulit bagi pemerintah untuk melakukan pembebasan, karena harga tanah masyarakat dipatok dengan harga yang sangat tinggi.